

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pekerja Migran.

1. Pengertian Pekerja Migran.

Definisi tenaga kerja migran itu cukup luas, meskipun biasanya lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang beroperasi di luar negeri. Secara umum, istilah ini merujuk pada individu yang berpindah dari daerah asal atau tempat tinggal permanen mereka untuk tujuan pekerjaan. Untuk kepentingan pekerjaan tersebut, pekerja migran akan tinggal di lokasi kerja mereka selama periode tertentu.

Pekerja migran yang dibahas dalam penelitian ini ialah individu yang berencana, sedang, atau telah melakukan aktivitas pekerjaan yang mendapatkan imbalan di negara yang bukan merupakan tempat kelahiran mereka. Penjelasan mengenai pekerja migran ini memiliki cakupan yang luas dan meliputi perlindungan bagi mereka yang berniat untuk menjadi pekerja migran, atau yang saat ini terlibat dalam pekerjaan di negara lain, maupun mereka yang telah menyelesaikan pekerjaan di luar negeri dan kembali ke tanah air mereka. Migrasi tenaga kerja adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perpindahan atau pergerakan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan.¹

Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) menjelaskan bahwa "pekerja migran" adalah individu yang berpindah, atau telah berpindah,

¹ Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (Jenewa : Komite Pengarah, 2009), 22.

dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk dipekerjakan oleh pihak lain, termasuk siapa saja yang diterima secara resmi sebagai migran untuk bekerja.

Selanjutnya, Pusat Sumber Daya Pekerja Migran menjelaskan bahwa buruh migran atau pekerja migran memiliki makna yang luas meskipun biasanya lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja di luar negeri.² Secara umum, ini merujuk kepada individu yang berpindah dari daerah asal atau tempat tinggal yang permanen untuk tujuan bekerja. Untuk kepentingan pekerjaan tersebut, pekerja migran akan tinggal di lokasi kerjanya selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi kriteria untuk bekerja di luar negeri dalam suatu perjanjian kerja untuk periode waktu tertentu dan mendapatkan imbalan berupa gaji.

Menurut penjelasan di atas, pengertian pekerja migran merujuk pada individu yang melakukan pekerjaan di negara asing untuk periode tertentu sesuai dengan kontrak kerja sambil mendapatkan gaji.

2. Jenis Pekerja Migran.

Berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja migran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a) Pekerja migran formal.

² Pusat Sumber Daya Pekerja Migran dalam Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (BMI)*, (Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 13 No. 3, Desember 2013), 209.

Pekerja migran formal adalah pekerja migran yang bekerja dalam sektor formal atau dapat dikatakan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berbadan hukum³. Contohnya adalah pelaut, perawat, terapis, suster, perawat orang lansia (*caregiver*), profesional pada industri migas, profesional bidang teknologi informasi dan pekerja pada kapal pesiar. Pekerja migran formal dapat dipastikan kondisinya jauh lebih baik dari para pekerja migran yang bekerja pada sektor informal.

b) Pekerja migran informal.

Pekerja migran informal adalah pekerja migran yang bekerja dalam sektor informal atau dapat dikatakan memiliki hubungan kerja dengan perseorangan.⁴ Contohnya adalah pembantu rumah tangga dan sopir. Sektor ini paling mendominasi dalam pengiriman pekerja migran, hal ini tidak lepas dari sumber daya manusia Indonesia yang sebagian besar pekerja migran yang bekerja di luar negeri memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga mereka hanya bisa mengisi sektor-sektor informal di luar negeri. Pekerja migran informal dalam prakteknya paling sering mengalami masalah dalam penempatannya.

3. Dampak Menjadi Migran.

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan salah satu strategi ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia. Di berbagai wilayah pedesaan, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. Akan

³ Teguh Wardoyo. *Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. (Jakarta : Jurnal diplomasi, 2010), 27.

⁴ Teguh Wardoyo. *Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. (Jakarta : Jurnal diplomasi, 2010), 27.

tetapi, fenomena ini tidak hanya membawa dampak ekonomi, melainkan juga berdampak sosial, psikologis, dan bahkan hukum bagi individu maupun masyarakat desa secara umum. Menurut ILO⁵, macam-macam dampak yang dapat terjadi akibat seseorang bekerja sebagai pekerja migran diantaranya:

a. Dampak Ekonomi.

Dari sisi ekonomi, menjadi PMI membawa dampak positif yang sangat dirasakan oleh keluarga dan komunitas desa. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui remitansi merupakan bukti paling nyata dari manfaat ini. Kiriman uang dari luar negeri oleh PMI memungkinkan keluarga mereka memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, kesehatan, dan pendidikan anak. Bahkan, banyak keluarga mampu melakukan renovasi rumah, membeli kendaraan, serta menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan tinggi⁶.

Namun, tidak semua dampak ekonomi bersifat positif. Banyak PMI berangkat dengan modal utang, baik dari lembaga pembiayaan, calo, atau sponsor, dengan bunga yang tinggi. Ketika mereka kembali ke tanah air dan tidak berhasil menabung karena upah rendah atau pemotongan yang tidak wajar, mereka tetap terjebak dalam beban utang⁷. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga yang tidak terencana sering kali menyebabkan kemiskinan kembali setelah remitansi berhenti. Dalam beberapa kasus, keberadaan uang justru membuat keluarga menjadi

⁵ International Labour Organization (ILO), *World Employment and Social Outlook: Trends 2020* (Geneva: ILO, 2020), hlm. 45–60.

⁶ BP2MI, *Profil Pekerja Migran Indonesia dan Dampak Sosial Ekonomi Remitansi*, (Jakarta: BP2MI, 2021), 52–55.

⁷ Wahyuni, L., *Dinamika Sosial Ekonomi Mantan TKI di Jawa Tengah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 53.

konsumtif dan tidak produktif secara ekonomi karena terlalu bergantung pada penghasilan dari luar negeri.

b. Dampak Sosial.

Dampak sosial dari menjadi PMI juga memiliki sisi positif. Keluarga PMI di desa kerap mendapatkan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Masyarakat memandang mereka sebagai keluarga yang "berhasil" karena memiliki rumah yang layak, kendaraan pribadi, serta mampu membiayai pendidikan anak-anak. Gaya hidup yang lebih mapan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi bagi warga lain untuk mengikuti jejak serupa. Dalam beberapa komunitas, keberhasilan mantan PMI yang membuka usaha sepulang dari luar negeri juga berdampak pada munculnya roda perekonomian lokal baru yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Namun demikian, sisi negatif dari dampak sosial tidak dapat diabaikan. Kepergian salah satu atau kedua orang tua, khususnya ibu, meninggalkan celah besar dalam pengasuhan anak. Anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri cenderung mengalami kesepian, penurunan prestasi belajar, hingga terlibat dalam perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan kenakalan remaja⁸. Disfungsi keluarga ini juga sering kali berujung pada perceraian karena minimnya komunikasi dan kedekatan emosional antara pasangan. Selain itu, gaya hidup konsumtif keluarga PMI juga menimbulkan kecemburuan sosial di

⁸ Fatika, B. D. A,dkk, *Pergaulan Anak yang Ditinggal Orang Tuanya Menjadi TKI*, (Jurnal Ilmu Sosial Unram, Vol. 18(1), 2024), 91–92.

kalangan warga yang tidak memiliki anggota keluarga di luar negeri, sehingga memunculkan jurang sosial di tengah masyarakat.

c. Dampak Psikologis.

Dari perspektif psikologis, banyak PMI yang pulang ke Indonesia dengan kepribadian yang lebih kuat. Mereka menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri, dan tangguh karena telah menghadapi tantangan hidup di negara asing⁹. Proses adaptasi dengan budaya baru dan lingkungan kerja yang penuh tekanan melatih mereka untuk berpikir kritis, bekerja keras, dan memiliki wawasan global. Beberapa dari mereka bahkan memiliki semangat kewirausahaan setelah kembali ke kampung halaman, dengan membuka usaha mandiri sebagai hasil dari pengalaman kerja di luar negeri.

Namun, tidak sedikit pula PMI yang mengalami dampak psikologis negatif. Hidup jauh dari keluarga, mengalami tekanan kerja tinggi, serta diskriminasi dan kekerasan dari majikan menjadi penyebab utama timbulnya stres, depresi, bahkan gangguan mental. Laporan dari International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa banyak pekerja migran asal Asia, termasuk Indonesia, mengalami gangguan psikis serius akibat isolasi sosial dan ketidakamanan kerja¹⁰. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dukungan psikososial, baik di negara penempatan maupun setelah mereka kembali ke tanah air, sehingga pemulihan menjadi lambat dan sulit.

⁹ Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A., *The Psychology of Culture Shock*, (London: Routledge, 2001), 85–87.

¹⁰ International Labour Organization (ILO), *Migrant Workers in Asia: Rights and Risks*, 27–30.

d. Dampak Hukum dan Keamanan.

Dalam aspek hukum, dampak positif dari menjadi PMI terlihat dari peningkatan kesadaran hukum di kalangan calon pekerja migran. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak PMI, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹¹. Selain itu, kesadaran untuk berangkat secara prosedural melalui jalur resmi mulai tumbuh, sehingga perlindungan terhadap pekerja lebih terjamin dan akses terhadap bantuan hukum menjadi lebih mudah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak PMI yang berangkat secara non-prosedural (ilegal) karena kurangnya informasi, biaya tinggi, atau tawaran jalur cepat dari calo. PMI yang tidak berdokumen menghadapi risiko tinggi, termasuk eksploitasi, pelecehan, kekerasan fisik, bahkan perdagangan manusia. Mereka tidak memiliki akses hukum yang jelas jika mengalami masalah di negara penempatan. Adharinalti (2012)¹², menegaskan bahwa meskipun hukum internasional menjamin perlindungan hak dasar bagi semua pekerja, namun implementasi di negara tujuan masih sangat lemah.

e. Dampak terhadap Lingkungan.

Secara kolektif, fenomena PMI memengaruhi struktur dan dinamika masyarakat desa. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan daya beli masyarakat desa akibat arus remitansi. Infrastruktur

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

¹² Adharinalti, *Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri*, (*Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1(1), 2012), 6–8.

rumah tangga mengalami perubahan, dari rumah semi permanen menjadi rumah tembok, serta berkembangnya usaha kecil yang dikelola oleh keluarga PMI. Dalam beberapa kasus, kembalinya PMI yang sukses juga memotivasi komunitas untuk mandiri secara ekonomi, dan menciptakan ekosistem sosial baru yang lebih modern.

Namun, dampak negatif terhadap masyarakat desa juga tidak sedikit. Kepergian tenaga produktif, terutama pemuda, menyebabkan desa kekurangan sumber daya manusia untuk sektor pertanian dan kegiatan sosial lainnya. Gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh keluarga PMI menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakharmonisan dalam hubungan antarwarga. Annika (2024) mencatat bahwa fenomena ini juga menggeser orientasi hidup masyarakat desa dari kerja lokal menjadi kerja ke luar negeri, sehingga menghambat pembangunan ekonomi berbasis lokal¹³.

B. Definisi Motif

1. Pengertian Motif

Motif adalah pendorong yang telah terhubung dengan suatu tujuan tertentu. Motif menunjukkan adanya keterkaitan sistematis antara respon tertentu dan keadaan pendorong yang ada. Motif yang dimiliki seseorang akan menghasilkan perilaku yang bertujuan untuk mencapai kepuasan.¹⁴ Selain itu, motif berfungsi sebagai alasan atau pendorong yang mendorong individu untuk melakukan tindakan atau bersikap dengan cara tertentu. Motif adalah konsep yang menjelaskan semua pendorong, alasan, atau dorongan dalam diri

¹³ Annika, A. A. B., *Migrasi Penduduk Indramayu sebagai TKI di Taiwan*, (Jurnal Sabana Literasi Sains, Vol. 7(1), 2024), 46–48.

¹⁴ M. Nur Ghufroon, Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 83.

manusia yang memicu tindakan. Setiap perilaku manusia pada dasarnya memiliki sebuah motif. Perilaku ini juga dapat disebut sebagai respons refleksi yang terjadi secara otomatis, dengan tujuan tertentu meskipun tidak selalu disadari oleh individu. Menurut Douglass¹⁵, jenis-jenis Motif diantaranya adalah:

a. Motif Ekonomi.

Motif ekonomi merupakan dorongan utama yang paling dominan dalam keputusan masyarakat untuk bekerja sebagai PMI. Motif ini berkaitan dengan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Keterbatasan lapangan pekerjaan di desa, rendahnya upah, serta ketidakpastian penghasilan dari sektor pertanian mendorong masyarakat mencari alternatif pekerjaan yang lebih menjanjikan di luar negeri.

Dalam banyak kasus, masyarakat melihat bekerja sebagai PMI sebagai solusi rasional untuk keluar dari tekanan ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan anak, perbaikan rumah, dan pelunasan utang. Dengan demikian, motif ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi.¹⁶

b. Motif Sosial.

Motif sosial berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga, tetangga, dan jaringan sosial yang telah lebih dahulu bekerja

¹⁵ Douglas S. Massey., *Dunia yang Bergerak: Memahami Migrasi Internasional di Akhir Milenium* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 6–15.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 18.

sebagai PMI. Dalam masyarakat desa, keberhasilan seseorang yang bekerja di luar negeri sering kali menjadi contoh nyata yang memengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama.

Selain itu, adanya dorongan dari keluarga untuk membantu perekonomian rumah tangga juga menjadi faktor penting. Dalam konteks ini, keputusan menjadi PMI tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial dan ekspektasi kolektif yang berkembang di masyarakat.¹⁷

c. Motif Psikologis.

Motif psikologis muncul dari dorongan internal individu yang berkaitan dengan keinginan untuk memperbaiki diri, mencari pengalaman baru, atau keluar dari tekanan hidup di lingkungan asal. Beberapa individu memilih menjadi PMI karena merasa jenuh dengan kondisi kehidupan di desa yang terbatas, atau ingin merasakan kehidupan di luar negeri sebagai bentuk aktualisasi diri.

Selain itu, tekanan emosional seperti konflik keluarga, beban hidup, atau perasaan tidak puas terhadap kondisi ekonomi juga dapat mendorong individu mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri. Motif ini menunjukkan bahwa keputusan menjadi PMI tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu.¹⁸

d. Motif Budaya dan Tradisi.

¹⁷ International Organization for Migration (IOM), *Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration* (Jakarta: IOM, 2020), 27.

¹⁸ M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S., *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 83.

Dalam beberapa kasus, keputusan menjadi PMI juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Di desa yang memiliki sejarah panjang migrasi tenaga kerja, bekerja ke luar negeri sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah bahkan menjadi bagian dari pola hidup masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya dipandang sebagai pilihan ekonomi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, individu cenderung mengikuti jejak generasi sebelumnya tanpa mempertanyakan kembali alasan di balik keputusan tersebut.¹⁹

e. Motif Status Sosial.

Motif status sosial berkaitan dengan keinginan individu untuk meningkatkan posisi sosial dalam masyarakat. Keberhasilan bekerja sebagai PMI sering kali diidentikkan dengan peningkatan kesejahteraan yang terlihat dari kepemilikan rumah yang lebih baik, kendaraan, serta gaya hidup yang lebih modern.

Hal ini menimbulkan dorongan bagi individu lain untuk mencapai status sosial yang serupa. Dengan demikian, menjadi PMI tidak hanya dipandang sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial dan meningkatkan prestise dalam lingkungan masyarakat.²⁰

¹⁹ Douglas S. Massey, dkk, *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*, (*Population and Development Review* 19, no. 3, 1993): 431–466.

²⁰ Widyaningtyas, N. M. et al., dkk, *Motivasi Masyarakat Bali sebagai TKI di Jepang*, (*Malaysian Social and Economic Journal* no. 2, 2024): 135.

C. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan sosial merupakan perilaku seseorang yang dapat memengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial punya arti yang berbeda; tindakan mencakup semua jenis perilaku manusia, sementara tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang ditujukan kepada orang lain dan memiliki makna baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Apabila suatu tindakan tidak ditujukan kepada orang lain dan tidak memiliki arti, maka itu tidak termasuk tindakan sosial, melainkan hanya disebut sebagai “tindakan.” Dengan demikian, tindakan sosial memiliki dampak terhadap orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga elemen penting yaitu tindakan itu sendiri, tujuan, dan pemahaman²¹.

Tindakan sosial menurut Weber dapat berupa tindakan yang secara langsung ditujukan kepada orang lain. Tindakan ini juga bisa bersifat internal atau diperuntukkan bagi individu lain, yang mungkin muncul akibat pengaruh dari keadaan tertentu. Selain itu, tindakan itu dapat berupa pengulangan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya pengaruh dari situasi yang sama, atau dapat juga berbentuk persetujuan yang bersifat pasif dalam kondisi tertentu²².

Tindakan sosial muncul saat seseorang memberikan arti pribadi pada perilaku mereka. Dengan kata lain, tindakan sosial berlangsung ketika anggota masyarakat melakukan suatu tindakan yang memiliki makna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam konteks ini, tindakan sosial akan menghasilkan hubungan antar individu. Menurut Weber, hubungan sosial adalah interaksi antara aktor-aktor yang berbeda, selama tindakan tersebut memiliki arti

²¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978), 4–26.

²² Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, 22–26.

yang menghubungkan dan mengarahkan kepada tindakan orang lain. Setiap individu berkomunikasi dan saling memberikan respon²³.

Weber juga mengulas tentang jenis-jenis tindakan sosial dan interaksi sosial yang dapat diamati. Dia membagi pemahaman ini menjadi dua kategori utama berdasarkan hubungan yang ada, menggunakan pendekatan rasional atau emosional. Kategori pertama adalah pemahaman yang bersifat langsung, yaitu memahami tindakan melalui pengamatan yang nyata. Kategori kedua adalah pemahaman yang bersifat eksploratif. Dalam hal ini, tindakan tertentu dari aktor ditempatkan dalam konteks penjelasan tentang fenomena yang mendasari perilakunya.²⁴

Max Weber dalam mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi system dan struktur sosial masyarakat yaitu:

1. Rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*).

Jenis Tindakan sosial Rasional instrumental ini adalah tindakan yang menunjukkan tingkat rasionalitas tertinggi. Tindakan ini melibatkan pilihan yang sadar dan logis yang berkaitan dengan tujuan tindakan serta sarana yang digunakan untuk mencapainya. Seseorang dipandang memiliki beragam tujuan yang mungkin diinginkan, dan berdasarkan kriteria tertentu, ia memilih satu tujuan di antara berbagai tujuan yang saling bersaing, kemudian individu tersebut mengevaluasi alat-alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut²⁵.

²³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. Talcott Parsons, (New York: Free Press, 1964), 88–90.

²⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 39.

²⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 220.

Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah mereka melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan masak-masak tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia dalam melakukan tindakan atau perilaku itu sadar akan apa yang dilakukannya dan sadar akan tujuan tindakannya.

2. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Werk Rational*).

Tindakan yang berorientasi nilai adalah tindakan sosial yang serupa dengan tindakan rasional yang bersifat instrumental. Tindakan ini dilakukan setelah mempertimbangkan dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi landasan dari tindakan tersebut. Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat Bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat²⁶.

Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai-nilai budaya dan agama, serta nilai-nilai lain yang diyakini oleh setiap orang dalam masyarakat. Tiap individu atau kelompok masyarakat memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang tidak sama, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing orang dalam konteks ini memiliki arti yang berbeda-beda.

3. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*).

²⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, 24–25.

Tindakan ini berbeda dari tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional yang berfokus pada nilai, karena tindakan afektif muncul secara spontan tanpa pertimbangan sadar, dipengaruhi oleh emosi dan perasaan individu. Tipe tindakan sosial ini lebih didorong oleh perasaan atau emosi tanpa adanya proses refleksi intelektual atau perencanaan yang disengaja. Ketika seseorang merasakan emosi yang kuat seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kebahagiaan, dan mengungkapkan perasaannya secara mendadak tanpa berpikir panjang, maka itu adalah contoh dari tindakan afektif, yang memang bersifat tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau standar rasional lainnya.²⁷

4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional action*).

Tindakan sosial ini dilakukan oleh individu karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang sudah menjadi norma dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, tindakan ini terjadi tanpa adanya perencanaan yang sadar sebelumnya, baik dalam metode maupun tujuannya. Mereka hanya mengulang apa yang sudah menjadi kebiasaan yang terjalin secara turun-temurun.

Jika di dalam suatu kelompok masyarakat terdapat dominasi terhadap orientasi tindakan sosial ini, maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan sangat dipengaruhi oleh tradisi yang telah ada sejak lama di daerah tersebut, sebagai acuan yang diterima tanpa dipertanyakan.²⁸

²⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221.

²⁸ Ibid. 221-228.

D. Teori Perubahan Sosial Max Weber.

Teori Perubahan Sosial menurut pandangan Max Weber berawal dari keyakinan bahwa pergeseran dalam komunitas tidak hanya ditentukan oleh elemen material atau ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aksi sosial orang-orang yang membawa makna subjektif. Weber menjadikan individu sebagai aktor utama dalam masyarakat, di mana setiap langkah yang diambil oleh individu mengandung arti tertentu dan ditujukan kepada orang lain. Dengan demikian, perubahan sosial diartikan sebagai akibat dari kumpulan aksi sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat.²⁹

Weber menciptakan pendekatan yang bersifat interpretatif melalui konsep *verstehen*, yang merupakan usaha untuk memahami makna subjektif yang terdapat pada tindakan manusia. Dalam konteks ini, perubahan sosial tidak bisa dijelaskan hanya lewat hubungan sebab-akibat yang objektif, tetapi juga perlu dipahami melalui penafsiran terhadap motif, tujuan, dan nilai yang menjadi dasar tindakan individu. Oleh karena itu, perubahan dalam masyarakat terjadi akibat perubahan dalam cara individu memahami dunia sosial mereka, yang selanjutnya mempengaruhi pola tindakan mereka.³⁰

Salah satu ide utama dalam pemikiran Weber yang sangat terkait dengan perubahan sosial adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah tahap di mana perilaku manusia semakin bergantung pada logika, efisiensi, dan perhitungan yang terstruktur. Weber mengamati bahwa masyarakat modern ditandai dengan peningkatan rasionalitas dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi,

²⁹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, 4–6.

³⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, 87–89.

hukum, dan administrasi. Proses ini mengakibatkan pergeseran dalam pola interaksi sosial, dari cara yang awalnya tradisional menjadi lebih terorganisir dan rasional.³¹

Selain rasionalisasi, Weber juga menyoroti signifikansi nilai dan gagasan dalam mendorong perubahan sosial. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok masyarakat dapat memengaruhi perilaku sosial mereka dan akhirnya mempengaruhi perubahan dalam struktur masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Weber mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai agama tertentu dapat memicu munculnya etos kerja yang terorganisir dan disiplin, yang selanjutnya berkontribusi pada perkembangan sistem ekonomi kapitalis.³² Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perubahan dalam sistem nilai dan keyakinan masyarakat.

Selanjutnya, Weber juga menguraikan bahwa perilaku sosial dapat menghasilkan efek yang tidak selalu sejalan dengan sasaran yang diinginkan, yang disebut sebagai akibat yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu bisa menimbulkan dampak lain yang tidak diperhitungkan. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat itu rumit dan tidak selalu bisa diprediksi dengan akurat³³

Dalam pandangan Weber, transformasi sosial juga terhubung dengan adanya proses diferensiasi sosial dan stratifikasi. Diferensiasi sosial merujuk pada timbulnya variasi dalam peran, posisi, dan fungsi di dalam masyarakat, sementara

³¹ Ibid. 87-95.

³² Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (London: Routledge, 2001), 25–30.

³³ Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978), 26–28.

stratifikasi sosial berhubungan dengan pengelompokan masyarakat ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kekuasaan, status, dan kondisi ekonomi. Weber menekankan bahwa perubahan pada satu bidang kehidupan sosial, seperti ekonomi atau kekuasaan, dapat berdampak pada keseluruhan struktur stratifikasi sosial.³⁴

Selain itu, Weber juga mengamati bahwa perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari proses modernisasi, yakni peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih teratur dan rasional. Modernisasi ditandai dengan kemajuan sistem birokrasi, hukum yang resmi, serta organisasi yang didasarkan pada peraturan dan efisiensi. Proses ini menyebabkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengatur kehidupan sosial mereka.³⁵

Dengan begitu, teori perubahan sosial menurut Max Weber menyoroti bahwa transformasi dalam masyarakat adalah hasil dari interaksi yang rumit antara perilaku sosial individu, rasionalitas, nilai-nilai, dan struktur sosial yang senantiasa berubah. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait dinamika sosial, karena tidak hanya mempertimbangkan faktor luar, tetapi juga menjadikan makna subjektif sebagai aspek penting dalam proses perubahan sosial.

³⁴ Ibid. 26-28.

³⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, 312–315.